

KPKNL
PAYO

**LAPORAN
KEUANGAN TAHUN
ANGGARAN 2023
(AUDITED)**

TINGKAT UAKPA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG PALEMBANG



KPKNL
Palembang

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 KPKNL Palembang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Palembang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, 13 Mei 2024
Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
Mardhanus Rudiyanto
NIP 197403161998031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional.....	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	27
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	47
VI. Lampiran	48

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
PALEMBANG
GEDUNG KEUANGAN NEGARA PALEMBANG BLOK C LANTAI 1-2
JALAN KAPTEN A. RIVAI NOMOR 4 PALEMBANG
TELEPON (0711) 352574, FAXIMILE (0711) 350801**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*) untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palembang, 13 Mei 2024
Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
Mardhanus Rudiyanto
NIP 197403161998031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp21.128.063.619 atau mencapai 184 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp11.459.131.000.

Realisasi Belanja Negara periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.774.694.241 atau mencapai 87 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.517.812.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp16.754.135.420 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp765.438.342; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 15.987.018.016; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 1.679.062; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp680.197.066 dan Rp16.073.938.354.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.149.274.842, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.180.041.286 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp18.969.233.556. Surplus Kegiatan Non Operasional dan pos-pos luar biasa masing-masing sebesar Rp13.500.000 dan Rp0, sehingga entitas mengalami surplus sebesar Rp18.982.733.556.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp13.402.624.873 ditambah surplus-LO sebesar Rp18.982.733.556 dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp16.311.420.075, sehingga terjadi kenaikan Ekuitas sebesar Rp2.671.313.481, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp16.073.938.354.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
PALEMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun 2023		%	Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
Pendapatan					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	11.459.131.000	21.128.063.619	184	23.169.930.428
Jumlah Pendapatan		11.459.131.000	21.128.063.619	184	23.169.930.428
Belanja					
Belanja Pegawai	B.2	0	0	-	0
Belanja Barang	B.3	0	0	-	0
Belanja Barang	B.4	2.290.929.000	1.909.614.982	83	1.771.648.000
Belanja Modal	B.5	3.226.883.000	2.865.079.259	89	0
Belanja Bantuan Sosial	B.6	0	0	0	0
Jumlah Belanja		5.517.812.000	4.774.694.241	87	1.771.648.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

II. NERACA

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
PALEMBANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	26.268.001	1
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	679.883.767	160.411.173
Pendapatan yang Masih harus Dite	C.4	5.723	0
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	6.750.000	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.6	(33.750)	0
Belanja Dibayar di Muka	C.7	0	0
Piutang Bulun Pajak	C.8	0	0
Persediaan	C.9	52.564.601	91.180.006
Jumlah Aset Lancar		765.438.342	251.591.180
Aset Tetap			
Tanah	C.10	12.835.987.000	12.835.987.000
Peralatan dan Mesin	C.11	4.684.613.597	4.646.933.896
Gedung dan Bangunan	C.12	2.855.229.119	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.13	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.14	17.539.525	17.539.525
Konstruksi dalam pengerjaan	C.15	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.16	(4.406.351.225)	(4.187.685.555)
Jumlah Aset Tetap		15.987.018.016	13.312.774.866
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.17	1.687.500	0
Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.19	(8.438)	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		1.679.062	0
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.20	0	0
Aset Lain-Lain	C.21	19.832.500	0
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	C.22	(19.832.500)	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		16.754.135.420	13.564.366.046
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	663.779.566	161.741.173
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.25	16.417.500	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		680.197.066	161.741.173
JUMLAH KEWAJIBAN		680.197.066	161.741.173
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	16.073.938.354	13.402.624.873
JUMLAH EKUITAS		16.073.938.354	13.402.624.873
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		16.754.135.420	13.564.366.046

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
PALEMBANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	21.149.274.842	23.144.992.156
JUMLAH PENDAPATAN		21.149.274.842	23.144.992.156
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0	-
Beban Persediaan	D.3	217.606.703	180.519.293
Beban Barang dan Jasa	D.4	962.392.083	968.864.711
Beban Pemeliharaan	D.5	211.065.100	241.746.297
Beban Perjalanan Dinas	D.6	556.149.800	328.714.935
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	232.785.412	224.402.441
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10	42.188	-
JUMLAH BEBAN		2.180.041.286	1.944.247.677
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		18.969.233.556	21.200.744.479
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		13.500.000	0
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		13.500.000	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		18.982.733.556	21.200.744.479
POS LUAR BIASA			
	D.12		
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		18.982.733.556	21.200.744.479

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
PALEMBANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
Ekuitas Awal	E.1	13.402.624.873	13.569.762.919,53
Surplus/Defisit LO	E.2	18.982.733.556	21.200.744.479
Koreksi Yang			
Menambah/Mengurangi Ekuitas:	E.3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	0	0
Selisih Revaluasi aset Tetap	E.3.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Reva	E.3.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E.3.5	0	0
Transaksi Antar Entitas	E.4	(16.311.420.075)	(21.367.882.526)
Kenailan/Pemurunan Ekuitas	E.5	2.671.313.481	(21.367.882.526)
Ekuitas Akhir	E.6	16.073.938.354	13.402.624.873

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang Palembang

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang berkedudukan di Jalan Kapten A Rivai No.04, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Melalui peran tersebut diharapkan pelayanan di bidang kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang kepada stakeholders dapat ditingkatkan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang berkomitmen dengan visi **"menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
- Mengamankan kekayaan negara secara fisik,

administrasi, dan hukum;

- Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, akuntabel;
- Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Pada tahun 2023 KPKNL Palembang berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sangat baik yaitu 114,88.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (*Unaudited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Palembang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

KPKNL Palembang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Palembang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari KPKNL Palembang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Palembang adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - ✓ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
 - ✓ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan
 - ✓ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga

perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau

perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
- Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Kewajiban

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan

kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Penyusutan Aset Tetap

9. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas

Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Sistem
Akuntansi
Tingkat
Instansi
(SAKTI)*

10. Implementasi Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI)

Mulai tahun 2018 KPKNL Palembang telah mulai melaksanakan implementasi SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi) yang mengintegrasikan seluruh aplikasi yang berkaitan dengan laporan keuangan yaitu RKAKL-DIPA, SAS/SPM, Persediaan, SIMAK BMN & SAIBA, yang terdiri dari beberapa modul yaitu modul penganggaran, komitmen, PPSPM, bendahara pengeluaran, aset tetap, persediaan dan General Ledger Pelaporan (GLP). Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2017 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis full akrual.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, KPKNL Palembang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Rincian Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	11.459.131.000	11.459.131.000
Jumlah Pendapatan	11.459.131.000	11.459.131.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	2.006.187.000	2.290.929.000
Belanja Modal	3.226.883.000	3.226.883.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	5.233.070.000	5.517.812.000

Realisasi

Pendapatan

Rp21.128.063.619

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.128.063.619 atau mencapai 184,38 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp11.459.131.000. Pendapatan KPKNL Palembang berasal dari terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Uraian	2023		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	25.500.000	0	0
Pendapatan Jasa Lainnya	0	2.045.852	0
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	11.433.631.000	21.088.955.751	184,45
Pendapatan Lain-lain	0	37.062.016	0
Jumlah	11.459.131.000	21.128.063.619	184,38

Realisasi Pendapatan Jasa Tahun 2023 mengalami penurunan 8,81 persen dibandingkan Tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan penggunaan jasa lelang melalui pejabat lelang kelas I.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ Turun (%)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	0	0	0
Pendapatan Jasa Lainnya	2.045,852	500	309,17
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	21,088,955,751	23,144,391,631	-8,88
Pendapatan Lain-lain	37,062,016	25,038,797	48,02
Jumlah	21,128,063,619	23,169,930,428	-8,81

*Realisasi Belanja
Negara
Rp4.774.694.241*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp4.774.694.241 atau 86,53% dari anggaran belanja sebesar Rp5.517.812.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.290.929.000	1.909.614.982	83,36
Belanja Modal	3.226.883.000	2.865.079.259	88,79
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	5.517.812.000	4.774.694.241	86,53

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 178,49% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya pengadaan belanja modal diikuti dengan peningkatan belanja barang untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ Turun (%)
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	1.909.614.982	1.714.496.027	11,38%
Belanja Modal	2.865.079.259	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Jumlah	4.774.694.241	1.714.496.027	178,49

Belanja Pegawai
Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Mulai tahun 2021 telah dilaksanakan sentralisasi pengelolaan

belanja pegawai pada Kantor Pusat DJKN, sehingga pada tahun 2022 dan tahun 2023 tidak ada anggaran Belanja Pegawai.

Belanja Barang
Rp1.909.614.982

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.909.614.982 dan Rp1.714.496.027. Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 mengalami kenaikan 11,38% dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja perjalanan dinas dan belanja barang non operasional dan belanja persediaan pada tahun 2023.

Perbandingan Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	773.791.750	774.569.477	(0,10)
Belanja Barang Non Operasional	158.326.300	154.882.000	2,22
Belanja Persediaan	178.991.298	176.500.084	1,41
Belanja Jasa	31.290.734	38.083.234	(17,84)
Belanja Pemeliharaan	211.065.100	241.746.297	(12,69)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	556.149.800	328.714.935	69,19
Jumlah Belanja	1.909.614.982	1.714.496.027	11,38

Belanja Modal
Rp2.865.079.259

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.865.079.259 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 63,63% dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat peningkatan kebutuhan fasilitas pelatihan akuntansi, berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, irigasi serta belanja modal lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.850.140	0	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.855.229.119	0	-
Jumlah Belanja	2.865.079.259	0	-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Bahwa tidak terdapat realisasi Belanja Modal Tanah baik TA 2023 maupun TA 2022. Hal ini disebabkan belum diperlukannya Belanja Modal Tanah.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 adalah sebesar Rp9.850.140, sementara pada tahun 2022 tidak ada belanja modal peralatan dan mesin. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan penambahan peralatan dan mesin karena peralatan dan mesin lama yang sudah usang.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.855.229.119 dan Rp0. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari penambahan tujuh unit rumah negara golongan II.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Bahwa tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan baik tahun 2023 maupun tahun 2022.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Bahwa tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya baik tahun 2023 maupun tahun 2022.

Belanja

Bantuan Sosial

Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Bahwa tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial baik tahun 2023 maupun tahun 2022. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di

Bendahara

Pengeluaran

Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Kas di

Bendahara

Penerimaan

Rp26.268.001

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp26.268.001 dan Rp1,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kas Lainnya

dan Setara Kas

Rp679.883.767

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp679.883.767 dan Rp160.411.173.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Pendapatan

yang Masih

C.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar

*Harus Diterima
Rp5.723*

Rp5.723 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima terdiri atas kinerja lelang yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 namun sampai dengan akhir periode laporan pemenang lelang belum melunasi nilai pokok lelangnya. Nilai pendapatan yang masih harus diterima atas kinerja lelang tahun 2023 dihitung berdasarkan nilai penetapan bea lelang oleh Pejabat Lelang yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023, pendapatan yang masih harus diterima dari kinerja lelang 2023 sebesar Rp5.723.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp6.750.000*

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.750.000 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022

No	Nama	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Sumarlin	6.750.000	-
Jumlah		6.750.000	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih -
Piutang Lancar
Rp (33.750)*

C.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(33.750) dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang
Lancar TA 2023 dan 2022*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	6.750.000	0,50%	33.750
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	6.750.000		33.750
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	6.750.000		33.750

*Belanja Dibayar
di Muka Rp0*

C.7 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.8 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0. dan Rp55.000.000. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Persediaan Rp52.564,601

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp52.564.601 dan Rp91.180.006. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahun 2023 dan 2022

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	52.564.601	91.180.006
Jumlah	52.564.601	91.180.006

Semua barang konsumsi pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah Rp12.835.987.000

C.10 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPKNL Palembang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.835.987.000.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahun 2023

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1.760 m ²	Jalan Murni Kel.9 Ilir Kec Ilir Timur II, Kota Palembang	12.835.987.000
Jumlah			12.835.987.000

Tanah seluas 1.760 m² yang terletak di Jalan Murai Kel.9 Ilir Kec Ilir Timur II, Kota Palembang. Adapun di atas tanah tersebut telah dibangun rumah negara golongan II.

*Peralatan dan
Mesin*

Rp4.684.613.597

C.11 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah Rp4.684.613.597. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	4.646.933.896
Mutasi tambah:	
Pembelian	9.850.140
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	47.662.061
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian Aset dari Penggunaan	(19.832.500)
Saldo per 31 Desember 2023	4.684.613.597
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(4.377.798.931)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	306.814.666

*Gedung dan
Bangunan*

Rp2.855.229.119

C.12 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.855.229.119 yang berasal dari transaksi penambahan bangunan berupa 7 bangunan rumah negara golongan II dengan total nilai sebesar Rp2.855.229.119. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	0
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	2.855.229.119
Perolehan Lainnya	2.411.870.569
Mutasi kurang:	0
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(2.411.870.569)
Saldo per 31 Desember 2023	2.855.229.119
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2016	2.855.229.119

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp340.000.000*

C.13 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah Rp0.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp17.539.525*

C.14 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp17.539.525. Aset tetap tersebut berupa monografi (buku perpustakaan).

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan Rp0*

C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp4.406.351.225*

C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah Rp4.406.351.225. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tahun 2023 dan Tahun 2022*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.684.613.597	4.377.798.931	306.814.666
2	Gedung dan Bangunan	2.855.229.119	28.552.294	2.826.676.825
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	17.539.525	0	17.539.525
Akumulasi Penyusutan		7.557.382.241	4.406.351.225	3.151.031.016

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Piutang Tagihan
TP/TGR
Rp1.687.500*

**C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.687.500. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.18 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 adalah Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –*

**C.19 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang Rp8.438

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.438. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	1.687.500	0,50%	8.438
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	1.687.500		8.438
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1.687.500		8.438

Aset Tak Berwujud Rp0

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 adalah Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain Rp19.832.500

C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 adalah Rp19.832.500. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Lainnya
Rp19.832.500

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah Rp19.832.500. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset
Lainnya Tahun 2023*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	19.832.500	19.832.500	0
Jumlah	19.832.500	19.832.500	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp663.779.566*

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp663.779.566 dan Rp161.741.173. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp16.417.500*

C.25 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.417.500.

*Ekuitas
Rp16.073.938.354*

C.26 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.073.938.354 dan. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp21.149.274.842

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp21.149.274.842 dan Rp23.144.992.156. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenakan/ Penurunan (%)
Pendapatan Jasa Lainnya	2.045.852	500.000	0
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	18.280.834.322	20.286.739.216	(10)
Pendapatan Bea Lelang Pengadaan	2.801.117.506	2.606.390.036	7
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	28.215.146	346.124.107	(89)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	37.063.016	25.038.797	48
Jumlah	21.149.274.842	23.144.992.156	(9)

Beban Pegawai
Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan
Rp27.1606.703

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp271.606.842 dan Rp180.519.293. Beban Persediaan merupakan beban

untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaihan/ Penurunan (%)
Beban Persediaan Konsumsi	271.606.703	180.519.293	50
Jumlah	271.606.703	180.519.293	50

*Beban Barang dan
Jasa
Rp962.392.083*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp962.392.083 dan Rp968.864.711. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaihan/ Penurunan (%)
Beban Keperluan Perkantoran	455.662.650	491.128.236	0,92
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	4.978.400	0	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30.007.500	37.241.000	(19,42)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	180.536.000	119.476.000	34,37
Beban Barang Operasional Lainnya	71.550.600	68.742.300	4,09
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	9.726.600	59.311.947	(83,60)
Beban Bahan	25.090.000	2.682.000	580,61
Beban Barang Non Operasional Lainnya	133.206.300	181.200.000	(11,46)
Beban Langganan Telepon	4.124.023	3.813.234	8,15
Beban Sewa	24.280.000	34.270.000	(29,75)
Beban Jasa Profesi	3.200.000	0	-
Jumlah	962.392.083	968.864.711	(0,67)

*Beban
Pemeliharaan
Rp211.065.100*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp211.065.100 dan Rp241.746.297. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000	0	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	201.065.100	241.746.297	(16,83)
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	-
Jumlah	211.065.100	241.746.297	(12,69)

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp556.149.800*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp556.149.800 dan Rp328.714.935. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan %
Beban Perjalanan Biasa	477.789.800	261.154.935	82,95
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	78.360.000	67.560.000	15,99
Jumlah	556.149.800	328.714.935	69,19

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp232.785.412*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp232.785.412 dan Rp224.402.441. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan

untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2023 dan 2022*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	204.233.118	224.402.441	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.552.294	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	232.785.412	224.402.441	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	232.785.412	224.402.441	-

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp42.188*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp42.188 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Tahun 2023 dan 2022*

Uraian Jenis Beban	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Panjang	42.188	0	-
Jumlah	42.188	0	-

*Surplus dari Kegiatan
Non Operasional
Rp13.500.000*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan %
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	13.500.000	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	13.500.000	0	-

Pos Luar Biasa Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp13.402.624.873

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.402.624.873 dan Rp13.569.762.919,53.

Defisit LO

Rp18.982.733.556

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp18.982.733.556 dan Rp21.200.744.479. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Selisih Revaluasi

Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang

berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi Rp0*

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-Lain
Rp0*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp16.311.420.075*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp16.311.420.075 dan Rp21.367.882.526. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Tahun 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai Tahun 2023
Diterima dari Entitas Lain	4.774.694.241
Ditagihkan ke Entitas Lain	(21.128.063.619)
Transfer Masuk	41.949.303
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Lang	-
Jumlah	(16.311.420.075)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp4.774.694.241 dan DKEL sebesar Rp21.128.063.619.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp41.949.303.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir

Rp16.073.938.354

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp16.073.938.354 dan Rp 13.402.624.872,53.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Saldo akun Kas di Bendahara Penerimaan dan Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang belum disetor sampai dengan akhir tahun 2021, seluruhnya telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada periode bulan Januari 2024.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala KPKNL Palembang Nomor KEP-140/KNL.0402/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Anggaran Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, berikut susunan Penanggung Jawab Pengelola Anggaran pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang:

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Mardhanus Rudiyanto
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Muhammad Rudi Hidayat
Pejabat Penandatanganan/ Penguji SPM	:	Marliana Damayanti
Bendahara	:	Yatinemi Arsih Oktavi
Pejabat Pengadaan	:	Sumarlin